

# **Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur**

*Deasy Dwi Ramiayu*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: [deasyramiayu94@gmail.com](mailto:deasyramiayu94@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Dewasa ini, tingginya angka pengangguran merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Meningkatnya angka pengangguran di Jawa Timur dapat menghambat program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 sampai 2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Fixed Effect Model, uji t parsial, uji F simultan, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji asumsi klasik yaitu autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Adapun variabel upah minimum tidak signifikan yang berarti upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka. Variabel lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.*

*Kata kunci: tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pendidikan, upah minimum kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi*

---

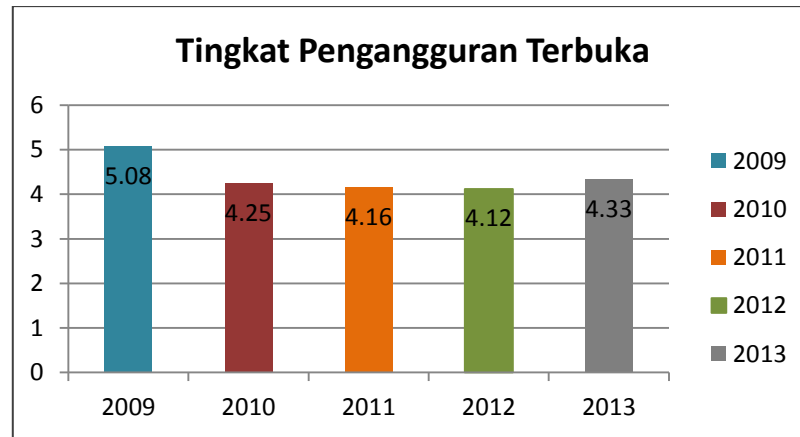
## **A. PENDAHULUAN**

Permasalahan utama yang sering terjadi di negara berkembang adalah tingginya angka pengangguran. Akan tetapi, permasalahan pengangguran saat ini belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Padahal pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Jika kesempatan kerja masih rendah dan jumlah pengangguran tinggi, maka tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat belum tercapai.

Menurut Sukirno (1994) yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Meningkatnya jumlah pengangguran merupakan masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Keadaan di Jawa Timur yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu memberikan kesempatan kerja kepada seluruh angkatan kerja. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang ada, sehingga jumlah pengangguran terus meningkat dan berdampak pada terhambatnya program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Di Jawa Timur, tingkat pengangguran sendiri mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir. Pada 2012, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur adalah 4,12%. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu 2013, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 4,33%. Berikut ini adalah data tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur tahun 2009-2013 :

Gambar 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur Tahun 2009-2013 (persen)



Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan rata-rata tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengangguran di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Adapun daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur adalah Kediri yaitu sebesar 8%. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,85%. Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka tertinggi berturut-turut diikuti oleh Kota Malang dengan angka 7,72%, Kabupaten Bangkalan (6,84%), Kota Madiun (6,66%), dan Kabupaten Bojonegoro (5,82%). Sama halnya dengan kondisi di Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Bojonegoro juga mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Kelima daerah tersebut memiliki tingkat pengangguran terbuka jauh lebih tinggi daripada angka rata-rata Jawa Timur dengan angka sebesar 4,33%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, Kota Madiun, dan Kabupaten Bojonegoro menyumbang tingkat pengangguran terbuka yang cukup besar untuk provinsi Jawa Timur.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah pendidikan masyarakat. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pendidikan diukur menggunakan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Todaro (2000) menyebutkan bahwa pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang ditempuh para pekerja. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara resmi dan sistemnya diatur berdasarkan kurikulum yang telah dirancang pemerintah. Untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah terus mengeluarkan program pendidikan, baik melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. BOS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006. Menurut penelitian yang dilakukan SMERU (2006), program BOS dapat memperbaiki kemampuan sekolah termasuk materi pembelajaran sebagai peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan mendukung kebijakan nasional untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang diterapkan pemerintah tahun 2009 membawa dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat golongan menengah ke bawah yang tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yakni pada tingkat Sekolah Menengah Pertama tanpa dipungut biaya apapun. Dengan program wajib belajar sembilan tahun, masyarakat dibina lebih baik dan diharapkan mampu bersaing di dunia kerja, sehingga program ini sangat diharapkan pemerintah untuk membantu mengurangi angka pengangguran.

Di Jawa Timur, rata-rata lama sekolah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Berikut ini data rata-rata lama sekolah Jawa Timur tahun 2009 sampai 2013 :

Tabel 1.1 **Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur Tahun 2009-2013 (tahun)**

Keterangan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>	7.20	7.24	7.34	7.45	7.53

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (diolah)

Pada tahun 2009, rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Timur adalah 7,2 tahun, sedangkan pada tahun 2013 adalah 7,53 tahun. Walaupun angka tersebut menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata lama sekolah selama 7 tahun menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur hanya memiliki pendidikan terakhir di tahun pertama Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Jawa Timur masih rendah walaupun Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun diterapkan. Adapun daerah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Malang dengan rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu dengan rata-rata 10,89 tahun atau setara dengan kelas menengah di Sekolah Menengah Atas. Rata-rata lama sekolah tertinggi selanjutnya diikuti oleh Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang dengan jenjang yang sama. Akan tetapi jika melihat data secara keseluruhan, hanya sebagian kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki rata-rata lama sekolah di atas rata-rata, sementara 19 Kabupaten dan Kota lainnya berada di bawah rata-rata. Daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah di Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang, dengan rata-rata lama sekolah 4,39 tahun atau setara dengan kelas 4 (empat) di jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah terendah berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo dengan jenjang pendidikan di kelas 6 (enam) sekolah dasar. Rendahnya rata-rata lama sekolah di daerah tersebut menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah dan Wajib Belajar Sembilan Tahun belum berjalan optimal di daerah-daerah tersebut. Seharusnya, dengan berjalannya program pendidikan pemerintah, penduduk daerah tersebut setidaknya berada pada jenjang sekolah menengah.

Kebijakan upah minimum di Indonesia pertama kali diterapkan pada akhir tahun 1970-an. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan upah minimum ini baru benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pada akhir tahun 1980-an (Pratomo dan Saputra, 2011). Kebijakan ini merupakan angin segar bagi para pekerja. Pasalnya, dengan diterapkannya upah minimum, para pekerja mendapatkan upah yang disesuaikan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang cenderung berbeda di tiap provinsi, termasuk kota dan kabupaten. Jika standar hidup di daerah tersebut naik, maka upah minimum disesuaikan dengan total dari kenaikan standar hidup tersebut. Berikut ini adalah upah minimum provinsi yang berlaku di Jawa Timur :

Tabel 1.2 **Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Rupiah)**

Tahun	Upah Minimum yang Diberlakukan
2009	570.000
2010	630.000

<b>2011</b>	705.000
<b>2012</b>	745.000
<b>2013</b>	866.250

Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (diolah)

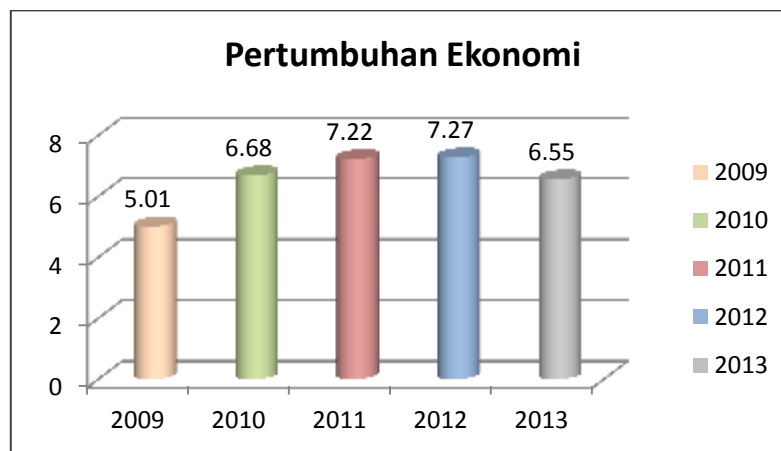
Pada tahun 2013, upah minimum provinsi yang dipatok pemerintah untuk provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp 866.250,-. Nominal tersebut adalah patokan upah terkecil, yaitu upah yang diberlakukan di Kabupaten Magetan. Sedangkan upah minimum tertinggi diberlakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yaitu sebesar Rp 1.740.000,-. Kedua daerah ini memiliki industri besar sehingga upah minimum yang dipatok adalah yang tertinggi di Jawa Timur.

Di balik manfaat yang diterima dari penerapan upah minimum, terdapat kekurangan dari kebijakan tersebut. Upah minimum seringkali menyebabkan kekakuan upah (*wage rigidity*). Kekakuan upah adalah kondisi di mana upah gagal menyesuaikan penawaran tenaga kerja dengan permintaannya. Jika upah riil berada di atas tingkat keseimbangan, hal ini berarti penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang berlebih berarti angkatan kerja yang tinggi dan tidak dapat ditampung oleh perusahaan, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di masyarakat (Salvatore, 2007). Untuk kondisi di Jawa Timur memang belum tentu terjadi kondisi kekakuan upah seperti yang telah diuraikan. Akan tetapi karena adanya peningkatan tingkat pengangguran terbuka di tahun 2013 maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran terbuka.

Selain rata-rata lama sekolah dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, pertumbuhan ekonomi dikatakan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian yang memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ataupun melalui pendapatan perkapita dari suatu negara. Penelitian yang dilakukan Okun (1980) dalam Mankiw (2006) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan mengurangi jumlah pengangguran.

Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2009 sampai 2013 :

Gambar 1.2 **Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Persen)**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2015 (diolah)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami peningkatan sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Akan tetapi, pada tahun 2013 mengalami penurunan ke titik 6,55% dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,27%. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2013 adalah Kota Batu dengan tingkat 8,2%, di mana angka tersebut menurun dari tahun 2012 sebesar 8,25%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi lainnya berturut-turut diikuti oleh Kota Madiun (8,07%), Kota Surabaya (7,34%), Kota Malang (7,3%), dan Kabupaten Gresik (7,14%). Angka ini tidak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata yang sebesar 6,55%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah oleh Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat 5,3%, Kabupaten Ponorogo (5,67%), Kabupaten Sampang (5,74%), Kabupaten Pacitan (6,02%), dan Kabupaten Blitar (6,18%). Pertumbuhan ekonomi dari kelima daerah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Timur juga menurun. Pertumbuhan ekonomi di lima daerah ini juga tidak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Jawa Timur yang berarti pertumbuhan ekonomi di tiap kabupaten/kota di Jawa Timur tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan-permasalahan seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kesempatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja harus ditanggapi lebih serius. Tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan taraf hidup dapat dilakukan dengan menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Jika masalah tersebut mampu diatasi, tujuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya melalui distribusi pendapatan akan tercapai.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini variabel yang diduga berpengaruh terhadap pengangguran adalah rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Surabaya dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,12 tahun memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28%, yang di atas rata-rata Jawa Timur. Selain itu, variabel lainnya seperti pertumbuhan ekonomi Bojonegoro yang sebesar 5,3%, memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,82%. Sehingga dapat diasumsikan terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka.

Dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten dan Kota Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten dan Kota Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten dan Kota Jawa Timur?

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Pengangguran**

Menurut Sukirno (1994) yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Todaro (2000), pengangguran terbuka merupakan istilah yang dipergunakan bagi mereka yang tidak bekerja, baik secara sukarela (mampu bekerja secara permanen, tetapi lebih memilih untuk tidak bekerja karena alasan tertentu) maupun karena terpaksa (ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkannya). Dalam kesehariannya, pengangguran ini tidak produktif dan belum mampu membiayai kebutuhan hidupnya sendiri. Penyebab pengangguran ini dapat bermacam-macam. Umumnya, pengangguran terbuka memang belum pernah memperoleh pekerjaan dikarenakan mereka baru saja menamatkan pendidikannya. Selain itu, ada pula pengangguran terbuka yang pernah bekerja, tetapi berhenti dari pekerjaan itu karena beberapa sebab, misalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengundurkan diri.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran di suatu negara terhadap jumlah angkatan kerja. Perhitungan tingkat pengangguran terbuka ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Berikut ini adalah perhitungan tingkat pengangguran terbuka dalam suatu daerah dengan satuan persen:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Di mana :

- Jumlah pengangguran meliputi jumlah masyarakat dalam suatu daerah yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan; dan
- Jumlah angkatan kerja meliputi penduduk pada usia kerja yaitu 15 tahun sampai 64 tahun termasuk yang bekerja atau memiliki pekerjaan, dan yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran)

### **Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sebagai modal manusia merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang vital. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas negara karena merupakan sarana masyarakat untuk menjadi lebih cakap dan terampil. Sehingga dengan keterampilan ini, masyarakat dapat menghasilkan output lebih banyak dan memperbaiki perekonomian (Todaro, 2006).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003, indikator tingkat pendidikan di Indonesia terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari :

1. Pendidikan dasar : Jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan menengah : Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3. Pendidikan tinggi : Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

### ***Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah dengan Pengangguran Terbuka***

Peranan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sudah diakui oleh semua negara. Menurut Todaro (2000) pendidikan formal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pekerja untuk tujuan pembangunan, tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap, dan aspirasi langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan. Dengan sistem pendidikan seperti kurikulum yang telah diatur pemerintah, pendidikan formal dapat dikatakan lebih mampu menjamin kualitas masyarakatnya. Semakin lama masyarakat menempuh dan lulus tamatan pendidikan formal, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan masyarakat tersebut untuk bekerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

### **Teori Modal Manusia (*Human Capital*)**

Salah satu teori tentang sumber daya manusia adalah teori modal manusia (*human capital*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Gary S. Becker pada tahun 1964. Teori ini menganggap bahwa penghasilan seseorang dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendidikan yang ditempuh. Menurut Bruce dan Hotchkiss (1999) dalam Atmanti (2005), dengan menambah satu tahun sekolah, berarti orang tersebut memiliki kemampuan kerja dan penghasilan yang lebih baik.

### **Teori Upah**

Upah atau gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu

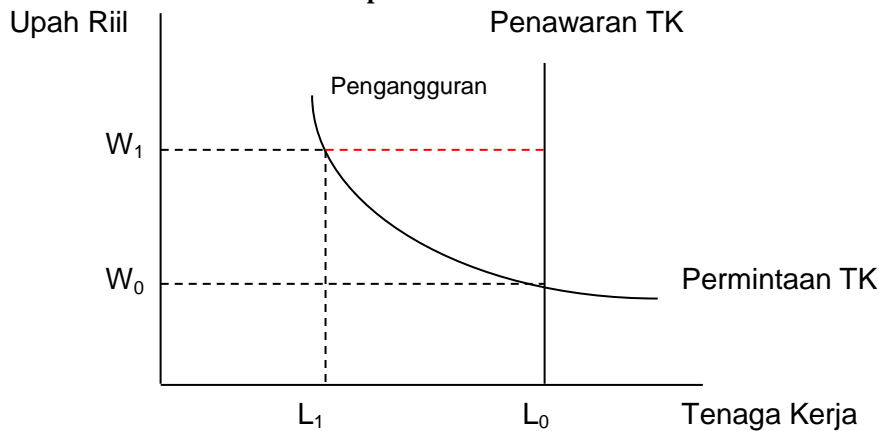
perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya (BPS, 2015). Upah minimum adalah penetapan suatu standar minimum yang harus dibayarkan oleh para pengusaha atau pelaku industri kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerja (Mankiw, 2006). Tujuan utama dari ditetapkannya upah minimum ini adalah mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal (Suparmoko, 1992). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah minimum ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja, yang disesuaikan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi ataupun kabupaten/kota
2. Upah minimum berdasarkan sektor di wilayah propinsi atau kabupaten/kota

**Hubungan Upah Minimum Kota/Kabupaten dengan Pengangguran Terbuka**

Diterapkannya kebijakan upah minimum seringkali menimbulkan kondisi kekakuan upah. Kekakuan upah (*wage rigidity*) adalah kondisi di mana upah gagal menyesuaikan penawaran tenaga kerja dengan permintaannya. Jika upah riil berada di atas tingkat keseimbangan, hal ini berarti penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang berlebih berarti angkatan kerja yang tinggi dan tidak dapat ditampung oleh perusahaan, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di masyarakat. Berikut ini adalah gambar kurva yang menjelaskan kondisi tersebut :

Gambar 2.1 Kurva Kekakuan Upah



Sumber : Mankiw, 2006

Kebijakan upah minimum (sebesar  $W_1$ ) di atas tingkat keseimbangannya adalah yang disebut kekakuan upah. Upah tidak bisa bergerak menuju titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum itu sendiri. Upah tidak akan turun ke tingkat  $W_0$  karena adanya kebijakan upah minimum di tingkat  $W_1$ . Oleh sebab itu, perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya menjadi tingkat  $L_1$  sehingga muncul pengangguran sebesar  $L - L_1$ .

**Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita. Dalam kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi biasanya menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara secara kuantitas.

Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB dari tahun ke tahun dengan satuan persen. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan metode yaitu :

$$PE = \frac{PDBt - PDBt - 1}{PDBt - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDB = Produk Domestik Bruto

t = tahun tertentu

t-1 = tahun sebelumnya

### ***Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengangguran Terbuka***

Okun (1980) dalam Mankiw (2006) melakukan penelitian di Amerika Serikat tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Teori ini lebih lanjut dikenal sebagai Hukum Okun. Menurut Okun, apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% di atas trend-nya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran memiliki hubungan negatif. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan mengurangi jumlah pengangguran

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Subana dan Sudrajat (2005), tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji suatu teori, menyajikan fakta secara statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur., sedangkan data tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota dan data pertumbuhan ekonomi (PDRB) menurut kabupaten/kota diambil dari Laporan In-Macro Jawa Timur yang didapatkan dari Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota diambil dari Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Untuk menentukan model regresi yang digunakan, maka menggunakan uji Hausman untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang akan digunakan. Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan :

$$TPT = \beta_0 + \beta_1 \log RLS + \beta_2 \log UMK + \beta_3 PE + e$$

di mana :

TPT (variabel terikat)	: Tingkat pengangguran terbuka
$\beta_0$	: Konstanta
RLS	: Rata-rata lama sekolah
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota
PE	: Pertumbuhan ekonomi
e	: Error term



## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujiannya adalah berikut :

- Jika  $\rho \text{ value} > 0.05 = H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- Jika  $\rho \text{ value} < 0.05 = H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect*, maka nilai probabilitas seluruh variabel independen sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Regresi dengan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.430656	4.875842	0.908696	0.3650
RLS	14.66208	6.200467	2.364673	0.0193
UMP	-0.424039	0.346883	-1.222426	0.2235
PE	-0.650947	0.128001	-5.085464	0.0000

Sumber: Hasil Fixed Effect Model, evIEWS 6.0

#### - Rata-Rata Lama Sekolah

Variabel rata-rata lama sekolah memiliki koefisien sebesar 14.66208 dan nilai signifikansi sebesar 0,0193 ( $< 0,05$ ). Variabel rata-rata lama sekolah menunjukkan signifikan dan memiliki slope positif. Hal ini menunjukkan bahwa secara positif dan signifikan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

#### - Upah Minimum

Variabel upah minimum memiliki koefisien sebesar -0.424039 dan nilai signifikansi sebesar 0,2235 ( $> 0,05$ ). Variabel upah minimum memiliki hasil yang tidak signifikan dan menunjukkan slope negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka.

#### - Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien sebesar -0,650947 dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ). Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hasil yang signifikan dan menunjukkan slope negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

#### b. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dalam uji F sebagai berikut :

- Jika  $\text{Prob}(F\text{-Statistic}) > \alpha : H_0$  diterima = Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- Jika  $\text{Prob}(F\text{-statistic}) < \alpha : H_1$  diterima = Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel bebas

Tabel 4.2 Hasil Uji F

F-statistic	10.20664
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Pengujian Uji F, evIEWS 6.0

Berdasarkan pengujian, nilai signifikansi F yaitu sebesar 0.0000 di mana kurang dari nilai  $\alpha$  5% (0,05), sehingga  $H_1$  diterima dan dapat diinterpretasikan bahwa semua variabel independen (rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (tingkat pengangguran terbuka).

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4.3 Hasil R-Squared

R-squared	0.732623
Adjusted R-squared	0.660844

Sumber : Hasil Pengujian dengan Model Fixed Effect, evIEWS 6.0

Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-squared menunjukkan hasil 0.7326. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semua variabel independen (rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) dapat menjelaskan variabel independen (tingkat pengangguran terbuka) sebesar 73,26%, sedangkan sisanya yaitu 26,74% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model regresi.

**Uji Asumsi Klasik**

a. Asumsi Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika dalam hasil uji korelasi antar variabel bebas melebihi 0,8, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas (Gujarati, 2010). Berikut ini adalah hasil korelasi seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

CORRELATION			
	RLS	UMP	PE
RLS	1.000000	0.161555	0.317210
UMP	0.161555	1.000000	0.282892
PE	0.317210	0.282892	1.000000

Sumber : Hasil Pengujian Korelasi, evIEWS 6.0

Berdasarkan pengujian, hasil korelasi antara variabel bebas tidak melebihi 0,80 atau dapat dikatakan tidak adanya indikasi multikolinearitas. Korelasi variabel upah minimum dengan rata-rata lama sekolah ( $0,161555 < 0,80$ ), rata-rata lama sekolah dengan pertumbuhan ekonomi ( $0,317210 < 0,80$ ), dan upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi ( $0,282892 < 0,80$ ). Dikarenakan tidak adanya indikasi multikolinearitas dalam uji korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini masing-masing variabel bebas tidak berhubungan dalam mempengaruhi variabel terikat.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam Uji Harvey, hipotesis yang digunakan adalah :

- Jika Prob. Obs\*R-squared  $> \alpha = H_0$  diterima, sehingga tidak ada indikasi heteroskedastisitas
- Jika Prob. Obs\*R-squared  $< \alpha = H_a$  diterima, sehingga ada indikasi heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Harvey :

Tabel 4.5 **Hasil Uji Heteroskedastisitas Harvey**

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	2.144879	Prob. F(3,186)	0.0961
Obs*R-squared	6.353228	Prob. Chi-Square(3)	0.0956
Scaled explained SS	5.228217	Prob. Chi-Square(3)	0.1558

Sumber : Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Harvey, eviews 6.0

Berdasarkan hasil pengujian di atas, probabilitas Obs\*R-squared adalah 0.0956 di mana lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 5% (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah Lagrange Multiplier (LM) dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut :

- Jika Prob. Chi-Square  $> \alpha = H_0$  diterima, maka tidak ada indikasi autokorelasi dalam model
- Jika Prob. Chi-Square  $< \alpha = H_a$  diterima, maka terdapat indikasi autokorelasi dalam model

Berikut ini adalah hasil pengujian autokorelasi dengan Lagrange Multiplier :

Tabel 4.6 **Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM test)**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.972133	Prob. F(2,185)	0.0536
Obs*R-squared	5.820015	Prob. Chi-Square(2)	0.0545

Sumber : Hasil Pengujian LM-Test, eviews 6.0

Dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai Obs\*R-squared sebesar 5,820015 dan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,0545 yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 5% (0,05). Karena nilai probabilitas Chi-Square  $> \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi autokorelasi.

**Pembahasan**

**Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan hasil regresi, variabel rata-rata lama sekolah memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar 14.66208. Adapun nilai signifikansinya sebesar 0,0193 ( $< 0,05$ ). Variabel rata-rata lama sekolah menunjukkan nilai yang signifikan dan memiliki slope positif. Hal ini berarti bahwa ketika rata-rata lama sekolah meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka juga akan meningkat. Temuan ini sesuai dengan penelitian Sari (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat”. Jurnal ini menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Artinya, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan bahwa ketika tingkat pendidikan meningkat, pengangguran juga meningkat.

Menurut Todaro (2000), di banyak negara berkembang, pendidikan dianggap faktor yang paling berperan untuk meningkatkan pendapatan dan kehidupan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima di masa mendatang. Beranjak dari asumsi inilah masyarakat berupaya menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang setinggi mungkin. Akan tetapi, masalah lain yang muncul adalah masyarakat menjadi selektif ketika melamar pekerjaan. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung memilih pekerjaan dengan upah yang tinggi untuk mengembalikan biaya pendidikan yang telah mereka keluarkan. Selain itu, faktor-faktor lainnya seperti status, latar belakang keluarga, dan dorongan orang tua menyebabkan mereka menjadi selektif memilih pekerjaan. Sehingga jenjang pendidikan kini bukan lagi indikator utama dalam mengatasi pengangguran.

Penjelasan di atas dianggap sesuai dengan kondisi pendidikan di Jawa Timur. Berikut ini adalah data tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan :

**Tabel 4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jawa Timur Tahun 2013 (persen)**

Tahun	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	SD Kebawah	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan	Diploma I/II/III	Universitas
<b>Februari</b>	1,89	6,36	6,86	6,31	2,61	5,21
<b>Agustus</b>	2,03	5,62	7,82	10,50	4,25	3,30

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014 (diolah)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka justru didominasi oleh penduduk yang pendidikannya tinggi, yaitu SMA, SMK, diploma, dan universitas (tenaga kerja terdidik). Sedangkan penduduk yang pendidikannya rendah, yaitu SD kebawah dan SMP (tenaga kerja kurang terdidik), tidak berkontribusi besar pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Dalam teori, semakin tinggi jenjang pendidikan penduduk, maka seharusnya semakin rendah kemungkinan menjadi pengangguran. Akan tetapi, data tersebut menggambarkan kondisi sebaliknya, di mana mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi justru lebih banyak yang menganggur dibandingkan penduduk yang berpendidikan rendah.

Tingkat pengangguran terbuka menurut jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA dan SMK yang tinggi disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang terbatas untuk kualifikasi pendidikan tersebut. Penduduk lulusan SMK, misalnya, akan cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka, sementara lowongan kerja untuk bidang tersebut belum berkembang. Selain itu, banyak dari mereka yang belum memiliki jiwa kewirausahaan, padahal dengan keahlian bidang tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan, dan bukan hanya mencari pekerjaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi didominasi oleh jenjang pendidikan SMK.

### **Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka tidak diterima. Berdasarkan hasil regresi, variabel upah minimum memiliki koefisien yang negatif sebesar -0.424039. Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,2235 ( $> 0,05$ ). Variabel upah minimum memiliki hasil yang tidak signifikan dan menunjukkan slope negatif. Hal ini berarti bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian

Lindiarta (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996-2013)”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Dikarenakan upah yang bersifat kaku, upah minimum yang diberlakukan tidak langsung berpengaruh pada tahun tersebut, tetapi berpengaruh pada jangka panjang.

Selain itu, upah minimum yang tidak signifikan mungkin dikarenakan oleh tingkat pendidikan pekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik kemampuannya. Namun, di Jawa Timur tingkat pendidikan penduduknya masih rendah. Menurut BPS, rata-rata lama sekolah masyarakat yaitu 7,53 tahun, atau setara dengan jenjang pendidikan SMP. Hal ini yang menyebabkan perusahaan sulit untuk menerapkan upah tinggi kepada pekerja dengan kualitas yang masih rendah. Selain itu, tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur menyebabkan kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*). Jawa Timur yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Indonesia, namun tingkat pendidikannya rata-rata hanya lulusan SMP, menyebabkan penawaran tenaga kerja adalah tetap pada setiap tingkat upah. Hal ini berarti setiap pekerja rela mendapatkan upah berapapun asalkan memiliki pekerjaan tetap. Hal inilah yang mungkin menyebabkan kebijakan upah minimum tidak berpengaruh secara nyata terhadap pengangguran di Jawa Timur.

Faktor lain yang menyebabkan upah minimum tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran terbuka mungkin juga disebabkan oleh upah minimum yang hanya diberlakukan pada sektor formal saja. Pada model dua sektor, yaitu formal dan informal, upah minimum seharusnya diberlakukan pada kedua sektor tersebut. Di Jawa Timur, sektor informal menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sektor formal. Berikut ini adalah data pekerja di sektor formal dan informal tahun 2013 :

**Tabel 4.8 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2013 (ribu orang)**

Status Pekerjaan Utama	Tahun	
	Februari 2013	Agustus 2013
<b>Kegiatan Formal</b>	<b>6.688,57</b>	<b>6.519,30</b>
- Berusaha dibantu buruh tetap	719,97	638,03
- Buruh/karyawan	5.970,60	5.881,27
<b>Kegiatan Informal</b>	<b>12.965,27</b>	<b>13.034,60</b>
- Berusaha sendiri	2.905,10	2.756,80
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.975,32	3.962,63
- Pekerja bebas	2.400,36	2.450,63
- Pekerja keluarga/tak dibayar	3.684,48	3.864,53
<b>Jumlah</b>	<b>19.653,84</b>	<b>19.553,91</b>

Sumber : BPS Jawa Timur, 2014 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak daripada sektor formal. Pada agustus 2013, penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 6.519,30 ribu orang, sedangkan di sektor informal sebanyak 13.034,60 ribu orang. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal ini mungkin merupakan salah satu penyebab upah minimum tidak berpengaruh pada pengangguran. Jika upah minimum hanya diberlakukan di sektor formal, maka pekerja di sektor tersebut akan mempertahankan pekerjaannya demi upah yang pasti sehingga mengurangi kesempatan kerja. Akibatnya, sektor informal menjadi tidak diuntungkan karena harus menanggung seluruh tenaga kerja yang tidak dapat ditampung oleh sektor formal. Terlebih lagi, dikarenakan upah yang tidak diregulasi di sektor informal, pekerja di sektor tersebut mendapatkan upah yang tidak pasti dan sulit memenuhi biaya hidup yang cenderung meningkat setiap tahun.

Sehingga apabila upah minimum tidak diberlakukan di sektor informal, dikhawatirkan tujuan regulasi upah untuk mensejahterakan masyarakat menjadi kurang optimal.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka, diterima. Berdasarkan hasil regresi, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien yang negatif sebesar  $-0,650947$ . Sedangkan nilai signifikansi sebesar  $0,0000 (< 0,05)$ . Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hasil yang signifikan dan menunjukkan slope negatif. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi yang bersifat negatif berarti ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Alghofari (2010) dan Fauzi (2009) yang menyatakan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori Okun yang menyatakan bahwa variabel GDP dengan pengangguran memiliki hubungan negatif (Mankiw, 2006). Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah pengangguran, dan sebaliknya.

Hasil uji t parsial yang signifikan berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka perusahaan cenderung meningkatkan produksi barang dan jasa. Untuk menaikkan jumlah produksi, faktor-faktor produksi akan dilibatkan termasuk faktor tenaga kerja. Dengan meningkatnya jumlah produksi maka perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga menurunkan jumlah pengangguran.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Di Jawa Timur, meningkatnya pendidikan masyarakat tidak menjamin tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk lulusan SMA, SMK, diploma, dan perguruan tinggi. Meningkatnya pendidikan masyarakat menyebabkan mereka lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung memilih menjadi pengangguran daripada bekerja yang kualifikasinya tidak sesuai dengan pendidikan mereka. Sehingga walaupun rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun, tidak bisa mengurangi tingkat pengangguran.
2. Upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Upah minimum tidak berpengaruh secara nyata terhadap pengangguran. Dikarenakan upah yang bersifat kaku, upah minimum yang diberlakukan tidak langsung berpengaruh pada tahun tersebut, tetapi berpengaruh pada jangka panjang. Sehingga ketika upah minimum diterapkan, upah minimum tidak langsung mendorong perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja. Akan tetapi, dalam jangka panjang upah minimum akan mendorong perusahaan untuk melakukan PHK dan meningkatkan pengangguran.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur diiringi dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi produksi tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan produksi barang dan jasa yang meningkat ini mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

## Saran

Berdasarkan temuan seperti yang telah dipaparkan, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya fenomena pengangguran terdidik di Jawa Timur, pemerintah sebaiknya menerapkan program pelatihan kerja (keterampilan khusus) untuk jenjang pendidikan tinggi. Dengan memiliki keterampilan khusus, maka akan memberikan nilai tambah bagi calon pekerja. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan program yang berbasis kewirausahaan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Akan tetapi, pemerintah tetap harus mendampingi yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada seluruh pelajar agar mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak bergantung pada mencari pekerjaan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka dapat menyerap tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran,
2. Perlunya kajian ulang mengenai pelaksanaan upah minimum di Jawa Timur, mengingat adanya kesenjangan upah minimum tertinggi dan terendah dengan selisih nominal berkisar 96%. Tingginya kesenjangan ini dikhawatirkan upah yang diterima pekerja tidak memenuhi KHL dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan pekerja. Selain itu, upah minimum sebaiknya tidak hanya diberlakukan di sektor formal, tetapi juga di sektor informal. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pekerja sektor informal yang tidak terjamin upahnya. Dengan pemberlakuan upah minimum pada kedua sektor tersebut diharapkan tujuan pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan menjadi lebih optimal.
3. Pemerintah sebaiknya mempertahankan sektor-sektor unggulan di Jawa Timur seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan tidak meningkatkan pajak terlalu tinggi. Jika pemerintah memberikan kemudahan, salah satunya dengan tidak mematok pajak terlalu tinggi, sektor unggulan tersebut tetap berkembang dan tidak mengurangi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Atmanti, Hastarini Dwi. 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. *Dinamika Pembangunan*, Volume 2 Nomor 1 halaman 30–39, Juli 2005.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2014*. (<http://jatim.bps.go.id/Brs/view/id/87>, diakses pada 17 mei 2016).
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur tahun 2004–2013*. (<http://jatim.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/238>, diakses pada 29 maret 2016).
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Laporan In-Makro Jawa Timur tahun 2009–2013*.
- Fauzi, Rizal. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1980-2007*. Tesis. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Gujarati, Damodar N. 2010. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Pratomo, Devanto S dan Saputra, Putu Mahardika A. 2011. *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Indonesia*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2011.

- Sari, Anggun Kembar. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- SMERU. 2006. *Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005*. Newsletter Nomor 19, Edisi Juli-September tahun 2006.
- Subana M., dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Jilid Satu. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (<http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>, diakses pada 17 januari 2016).